

PELIBATAN KELOMPOK RENTAN DALAM PENGURANGAN RISIKO BENCANA

7

Dinar Wahyuni

Abstrak

Kelompok rentan memiliki keterbatasan dan kebutuhan khusus sehingga berisiko tinggi terhadap bencana. Tulisan ini mengkaji pelibatan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana. Paradigma yang menempatkan kelompok rentan sebagai korban harus diubah. Kelompok rentan perlu dilibatkan dalam pengurangan risiko bencana sesuai dengan karakteristik dan kebutuhannya. Pelibatan anak dalam pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan sejak dini. Perempuan sebagai agen perubahan berperan mentransfer pengetahuan dan keterampilan kepada anak, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Penyandang disabilitas dan lansia dilibatkan dalam perencanaan kegiatan pengurangan risiko bencana sehingga arah kebijakan pengurangan risiko bencana lebih tepat dan sesuai dengan kebutuhannya. Melibatkan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana harus didukung oleh sinergitas semua pihak terkait. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah.

Pendahuluan

Memasuki akhir tahun 2021, bencana alam melanda sejumlah daerah di Indonesia. Belum selesai penanganan banjir Sintang di Kalimantan Selatan, Gunung Semeru meningkat aktivitasnya pada 4 Desember 2021. Dampak erupsi Gunung Semeru dirasakan masyarakat di delapan desa di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur (kontan.co.id, 4 Desember 2021).

Puluhan orang menjadi korban, demikian juga rumah dan bangunan fisik lain ikut terkena dampak erupsi.

Di Nusa Tenggara Barat, banjir bandang dan longsor melanda Kabupaten Lombok Barat, Kabupaten Lombok Utara, dan Kota Bima Pulau Sumbawa pada 6 Desember 2021 (kompas.id, 6 Desember 2021). Ribuan warga terdampak dan beberapa orang masih dalam tahap pencarian.



Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan cuaca ekstrem di Indonesia akan terus terjadi hingga awal tahun depan.

Banyaknya daerah rawan bencana di Indonesia, tidak terlepas dari faktor geografis Indonesia di mana terdapat pertemuan tiga lempeng tektonik, yaitu Lempeng Eurasia, Lempeng Pasifik, dan Lempeng Indo-Australia. Dampaknya, tingkat paparan masyarakat terhadap potensi ancaman bencana cukup tinggi. Kelompok rentan memiliki risiko paling tinggi terhadap bencana. Selama ini, kelompok rentan hanya dipandang sebagai korban yang membutuhkan perhatian dan penanganan khusus. Sementara kerentanan kelompok dapat dikurangi melalui pemahaman risiko bencana serta kemampuan mengelola risiko tersebut. Oleh karena itu, pelibatan kelompok rentan dalam upaya pengurangan risiko bencana menjadi hal penting. Tulisan ini mengkaji pelibatan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana.

Kelompok Rentan Bencana dan Pengurangan Risiko Bencana

Kelompok rentan merupakan kelompok masyarakat berisiko tinggi, karena berada dalam situasi dan kondisi yang kurang memiliki kemampuan mempersiapkan diri dalam menghadapi risiko bencana atau ancaman bencana. Undang-Undang No. 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (UU Penanggulangan Bencana) menyebutkan bahwa kelompok rentan terdiri dari bayi, balita, anak-anak, ibu yang sedang mengandung atau menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia (lansia).

Dalam implementasi, perempuan mempunyai kerentanan tinggi terhadap risiko bencana bukan hanya pada ibu mengandung dan menyusui saja. Hal ini terlihat dari kecenderungan perempuan paling banyak menjadi korban bencana baik terluka maupun meninggal (Hastuti, 2016). Oleh karena itu, tulisan ini memasukkan perempuan secara umum dalam kategori kelompok rentan, tidak hanya ibu mengandung atau menyusui.

Berdasarkan United Nations International Strategy for Disaster Reduction (UNISDR), pengurangan risiko bencana adalah konsep dan praktik mengurangi risiko bencana melalui upaya sistematis untuk menganalisis dan mengelola faktor-faktor penyebab bencana termasuk melalui pengurangan keterpaparan terhadap ancaman bahaya; kerentanan penduduk dan harta benda; pengelolaan lahan dan lingkungan secara bijak; dan peningkatan kesiapsiagaan terhadap peristiwa-peristiwa yang merugikan (UNISDR, 2015). Adapun kegiatan pengurangan risiko bencana sesuai UU Penanggulangan Bencana meliputi pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; serta penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana.

Dengan demikian, pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan merupakan upaya mengelola risiko bencana pada kelompok rentan dengan meningkatkan ketangguhan

kelompok rentan. Ketangguhan kelompok rentan dapat terbentuk apabila mereka telah memahami dan menyadari risiko bencana serta mampu mengelola risiko yang terdapat dalam diri dan lingkungannya.

Pelibatan Kelompok Rentan dalam Upaya Pengurangan Risiko Bencana

Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 menjadi awal terjadinya perubahan pada penanganan bencana. Penanganan bencana tidak lagi difokuskan pada manajemen bencana tetapi ke arah manajemen risiko bencana. Manajemen risiko bencana ditujukan pada pencegahan munculnya risiko baru, pengurangan risiko yang sudah ada serta penguatan ketangguhan (UNISDR, 2015). Pentingnya partisipasi aktif dari masyarakat dalam pengurangan risiko bencana akan memperkuat potensi dan kekuatan lokal dalam menghadapi bencana.

Selama ini kelompok rentan menjadi kelompok yang paling berisiko tinggi pada saat terjadi bencana. Oleh karena itu, upaya pengurangan risiko bencana perlu melibatkan kelompok rentan. Adapun upaya pengurangan risiko bencana pada kelompok rentan dapat dilakukan melalui pengelolaan risiko yang ada pada kelompok rentan tersebut. Kelompok rentan yang selama ini dipandang sebagai objek harus diubah menjadi subjek yang perlu dilibatkan dalam kegiatan bencana, baik pra-bencana, saat bencana, maupun pasca-bencana. Melalui pelibatan kelompok rentan dalam setiap kegiatan bencana, akan tergalikan kebutuhan kelompok

rentan sehingga kebijakan dan aksi pengurangan risiko bencana akan dilakukan tanpa mengabaikan kebutuhan kelompok rentan tersebut.

Pelibatan kelompok rentan dalam upaya pengurangan risiko bencana disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing. *Pertama*, pelibatan anak dalam pengurangan risiko bencana. Anak-anak sebagai kelompok yang paling rentan perlu dimotivasi untuk menciptakan lingkungan sebagai tempat yang aman untuk hidup. Penelitian yang dilakukan oleh Amri tahun 2017 menunjukkan, kebanyakan anak-anak di Indonesia menyadari adanya ancaman bahaya di sekitar mereka (Siregar dan Wibowo, 2019: 35). Namun demikian, pengetahuan anak terhadap risiko bencana dan upaya mengurangi risiko tersebut masih sangat terbatas. Oleh karena itu, pendidikan kebencanaan harus mulai diajarkan di sekolah sejak dini.

Pendidikan dan pengetahuan kebencanaan akan memengaruhi sikap dan tindakan seseorang dalam menghadapi bencana. Pendidikan kebencanaan tidak hanya sebatas meningkatkan pengetahuan dan keterampilan anak dalam menghadapi bencana, tetapi juga menumbuhkan kesadaran dalam diri anak akan pentingnya menjaga hubungan dengan lingkungan di sekitarnya. Pembelajaran pendidikan kebencanaan di sekolah diharapkan akan dapat menjadi sebuah *transfer knowledge* bagi masyarakat. Mengingat pentingnya pendidikan kebencanaan bagi anak, maka pendidikan kebencanaan perlu diintegrasikan ke dalam

kurikulum pendidikan agar dapat menumbuhkembangkan pengetahuan dan keterampilan dalam mengurangi risiko bencana.

Kedua, pelibatan perempuan dalam pengurangan risiko bencana dapat dilakukan melalui penguatan kesadaran perempuan dalam memahami situasi lingkungan dan ancaman bahaya; peningkatan pemahaman tentang kerentanan dan kemampuan untuk mengukur kapasitas yang dimiliki masing-masing perempuan; peningkatan kemampuan untuk menilai risiko yang dihadapi perempuan sebagai individu, anggota keluarga, dan masyarakat; peningkatan kemampuan untuk merencanakan dan melakukan tindakan dalam rangka mengurangi risiko bencana; serta peningkatan kemampuan memantau, mengevaluasi, dan menjamin keberlangsungan upaya pengurangan risiko sehingga dampak bencana dapat dikurangi (Hastuti, 2016).

Perempuan mempunyai peran strategis dalam mentransfer pengetahuan dan keterampilannya tentang pengurangan risiko bencana kepada anak-anaknya, keluarga, dan lingkungan sekitarnya. Dalam kondisi ini, perempuan memainkan peran sebagai agen perubahan yang menentukan arah dan kebijakan terkait pengurangan risiko bencana sehingga akan tumbuh budaya sadar bencana dalam masyarakat.

Ketiga, pelibatan penyandang disabilitas dalam pengurangan risiko bencana. Kerentanan penyandang disabilitas dapat dikurangi dengan melibatkan mereka dalam perencanaan pengurangan risiko bencana. Penyandang disabilitas lebih

mengetahui kondisi dan kebutuhan yang paling sesuai. Pembuatan program pengurangan risiko yang memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas harus menggunakan media yang aksesibel bagi penyandang disabilitas dan disesuaikan dengan jenis disabilitasnya. Demikian juga dalam hal komunikasi risiko bencana yang akan lebih efektif apabila melibatkan penyandang disabilitas sehingga transfer pengetahuan dan keterampilan kebencanaan bagi penyandang disabilitas akan lebih mudah. Harapannya perilaku sadar bencana akan membudaya dalam kehidupan para penyandang disabilitas.

Dalam menghadapi bencana, strategi dalam mengkomunikasikan sistem peringatan bencana berbeda untuk setiap jenis disabilitasnya. Selanjutnya kesiapsiagaan keluarga juga menjadi hal penting pada saat terjadi bencana. Keluarga adalah orang terdekat dan mereka percaya. Karena itu, pelatihan penyelamatan penyandang disabilitas haruslah diikuti oleh pihak keluarga.

Keempat, pelibatan lansia dalam pengurangan risiko bencana. Pelibatan lansia dalam kegiatan pengurangan risiko bencana akan mengurangi kerentanan terhadap bencana. Sudah saatnya lansia tidak lagi dipandang sebagai korban yang membutuhkan pertolongan khusus, namun lansia harus dipandang sebagai kelompok masyarakat yang dapat diberdayakan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana. Pelibatan lansia dapat dimulai dari perencanaan risiko bencana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Penanaman budaya sadar bencana juga menjadi hal penting dalam kegiatan pengurangan

risiko bencana. Transfer pengetahuan kebencanaan dapat dilakukan dengan memanfaatkan kearifan lokal. Selanjutnya saat terjadi bencana, lansia dapat dijadikan relawan. Lansia akan meningkat kepercayaan dirinya ketika mendapat pengakuan dari masyarakat. Hal ini akan membuka kesempatan bagi lansia untuk memperbaiki keadaan menjadi lebih baik di antara kelompok rentan lain.

Pelibatan kelompok rentan dalam pengurangan risiko bencana perlu didukung basis data. Selama ini basis data kelompok rentan yang tersedia belum sama antar-instansi. Perlu upaya pengintegrasian data untuk meningkatkan kualitas pelayanan kelompok rentan saat darurat bencana. Pemerintah dapat menunjuk salah satu kementerian atau lembaga terkait untuk menjadi *leading sector* dalam pendataan kelompok rentan. Dengan demikian data akan terpusat di satu pintu. Ketersediaan basis data yang akurat dan cepat akan menjadi dasar pemetaan kebutuhan kelompok rentan dalam penanganan bencana.

Penutup

Dalam upaya pengurangan risiko bencana, paradigma yang selama ini menempatkan kelompok rentan sebagai korban yang membutuhkan penanganan khusus harus diubah. Kelompok rentan perlu dilibatkan dalam kegiatan pengurangan risiko bencana sesuai karakteristik dan kebutuhannya agar arah kebijakan pengurangan risiko bencana dapat dirumuskan dengan tepat dan sesuai dengan kebutuhan. Pelibatan anak dalam pengurangan risiko bencana dilakukan melalui pendidikan kebencanaan sejak dini. Perempuan sebagai agen perubahan bagi lingkungan di sekitarnya. Penyandang

disabilitas dilibatkan dalam perencanaan pengurangan risiko bencana dengan memperhitungkan kebutuhan khusus penyandang disabilitas. Sementara lansia dapat diberdayakan mulai dari perencanaan kegiatan mitigasi bencana, saat terjadi bencana, hingga kegiatan pasca-bencana sesuai karakteristiknya.

Melibatkan kelompok rentan dalam upaya pengurangan risiko bencana harus didukung sinergitas semua pihak terkait. Basis data kelompok rentan juga menjadi kebutuhan penting dalam upaya pengurangan risiko bencana. Melalui fungsi pengawasan, Komisi VIII DPR RI perlu mendorong pemerintah untuk melibatkan kelompok rentan dalam perencanaan pengurangan risiko bencana sesuai dengan kebutuhan dan karakteristiknya. Selain itu, Komisi X DPR RI perlu mendorong Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi untuk mengintegrasikan pendidikan kebencanaan dalam kurikulum sekolah.

Referensi

- “Bencana Kepung NTB, Empat Warga Meninggal dan Satu Hilang di Lombok”, 6 Desember 2021, <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2021/12/06/empat-warga-meninggal-dunia-dan-satu-hilang-akibat-banjir-bandang-di-lombok>, diakses 8 Desember 2021.
- “Gunung Semeru Erupsi, 8 Desa di 2 Kecamatan di Lumajang Ikut terdampak”, 4 Desember 2021, <https://regional.kontan.co.id/news/gunung-semeru-erupsi-8-desa-di-2-kecamatan-di-lumajang-ikut-terdampak>, diakses 7 Desember 2021.

- Hastuti. 2016. Peran Perempuan Dalam Menghadapi Bencana di Indonesia. *Jurnal Geomedia*, 14 (2): 13-21.
- Siregar, J.S. dan Adik Wibowo. 2019. Upaya Pengurangan Risiko Bencana Pada Kelompok Rentan. *Jurnal Dialog Penanggulangan Bencana*, 10 (1): 30-38.
- UNISDR. 2015. Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030. https://www.unisdr.org/files/43291_sendaiframeworkfordrren.pdf, diakses 8 Desember 2021.



Dinar Wahyuni
dinar.wahyuni@dpr.go.id

Dinar Wahyuni, S.Sos., M.Si. menyelesaikan pendidikan S1 Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2004 dan pendidikan S2 Magister Sosiologi Universitas Gadjah Mada pada tahun 2007. Saat ini menjabat sebagai Peneliti Madya Bidang Kesejahteraan Sosial pada Pusat Penelitian-Badan Keahlian DPR RI. Beberapa karya tulis ilmiah yang telah dipublikasikan melalui jurnal dan buku, antara lain: "Revitalisasi Model Penanganan Pekerja Anak" (2017); "Peran Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan dan Kesehatan di Kecamatan Banda Neira" (2018); dan "Pengembangan Desa Wisata Pentingsari, Kabupaten Sleman dalam Perspektif Partisipasi Masyarakat" (2019).

Info Singkat

© 2009, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
<http://puslit.dpr.go.id>
ISSN 2088-2351

Hak cipta dilindungi oleh undang-undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi tulisan ini tanpa izin penerbit.